

### BAB III

## KEHIDUPAN SEHARI-HARI ETNIS TIONGHOA TAMBAK

### BAYAN MASA ORDE BARU

#### 3.1 Proses Adaptasi Etnis Tionghoa Tambak Bayan dalam Merespon Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Masa Orde Baru merupakan salah satu fase penting dalam eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia, tidak terkecuali etnis Tionghoa Tambak Bayan. Orde Baru merupakan sebutan terhadap masa pemerintahan Presiden Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia.<sup>1</sup> Sejak zaman kolonial, etnis Tionghoa menghadapi berbagai perilaku rasialis dan diskriminatif yang terstruktur ataupun individualis. Namun, dapat dikatakan bahwa Orde Baru merupakan momen puncak perilaku rasialis dan diskriminatif yang pernah dialami etnis Tionghoa di Indonesia.

Sikap diskriminatif dan rasialis terhadap etnis Tionghoa era Orde Baru pada dasarnya adalah diskriminasi politik dan administratif.<sup>2</sup> Diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa pada era Orde Baru merupakan turunan dari usaha Soeharto untuk membersihkan segala hal yang berkaitan dengan Orde Lama. Salah satu yang terdampak dalam pembersihan ini adalah etnis Tionghoa dengan segala aktifitas

---

<sup>1</sup>Orde Baru dimulai bukan ketika Soeharto dilantik menjadi presiden pada tahun 1968 sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada [27 Maret](#) 1968. Tetapi Orde Baru dianggap sudah berjalan sejak diterbitkannya SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) tahun 1966. Kewenangan penuh yang diberikan SUPERSEMAR pada Soeharto memosisikan dirinya setara presiden yang dapat mengambil keputusan-keputusan strategis. (Djurmawan, Dkk. "Politik Islam Orde Baru: Studi Sikap Organisasi Islam Atas Kebijakan Pemerintah Soeharto" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 15.)

<sup>2</sup>Kerusuhan dan huru-hara yang terjadi merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan politik terkait etnis Tionghoa yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah.

yang berkaitan seperti politik, kebudayaan, keagamaan, kewarganegaraan dan kemiliteran. Sebab utamanya ialah hubungan Soekarno dengan pemerintah RRT serta kaitannya dengan paham komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>3</sup> Terutama dengan adanya peristiwa 30 September 1965 yang erat kaitannya dengan paham komunis PKI, mengakibatkan pelarangan keterlibatan etnis Tionghoa dalam kegiatan politik sehingga pada akhirnya mereka hanya bisa memasuki bidang ekonomi.<sup>4</sup>

Meski demikian, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tersebut secara umum memiliki dampak yang berbeda berkaitan dengan implementasi kebijakan Orde Baru oleh perangkat pemerintah di tingkat daerah. Sikap warga pribumi dalam menyambut kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa juga berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Begitu pula respon dari etnis Tionghoa yang cukup beragam.

Menjadi Tionghoa dan miskin pada masa Orde Baru boleh jadi merupakan mimpi buruk bagi mereka yang bernasib demikian. Etnis Tionghoa miskin menjadi kaum paling tersisihkan dalam pergulatan kehidupan pada masa Orde Baru. Etnis

---

<sup>3</sup>Salah satu peristiwa *pembersihan* segala hal yang terkait Orde Lama dan Etnis Tionghoa adalah peristiwa Mangkuk Merah. Peristiwa mangkuk merah merupakan tragedi berdarah yang terjadi di Kalimantan Barat pada masa Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Selepas konfrontasi dengan Malaysia, tentara bentukan Orde Lama (Paraku-PGRS) yang didominasi oleh orang Tionghoa berbalik menjadi musuh bagi negara. Ratusan etnis Tionghoa anggota Paraku-PGRS dibunuh oleh TNI dan warga Dayak yang terprovokasi. Pada tahap selanjutnya, tidak hanya anggota Paraku-PGRS, kerusuhan berkembang menjadi pembunuhan bagi setiap warga Tionghoa. Sekitar 3000 etnis Tionghoa di Kalimantan Barat tewas dan 37.000 orang mengungsi ke kota-kota besar seperti Pontianak dan Singkawang. ("37.000 WNI keturunan Tjina & WNA Tjina mengungsi dari desa2 Kalbar Akibat Amukan Demonstrasi Rakjat Jang Ditunggangi oleh PGRS" *Surabaya Post*, 24 November 1967.)

<sup>4</sup>M.D. La Ode, *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012), hlm. 132.

Tionghoa miskin mengalami diskriminasi ganda sebagai konsekuensi dari status sosialnya sebagai Tionghoa dan sebagai masyarakat miskin kota. Dalam layanan publik, mereka tetap mengalami diskriminasi karena stigma mapan secara ekonomi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa pada umumnya. Sebagai sesama warga miskin mereka juga disisihkan dari berbagai program bantuan dan terkadang tidak terdata sebagai penerima bantuan.<sup>5</sup>

Dampak akibat kebijakan diskriminatif Orde Baru langsung dirasakan masyarakat Tionghoa Tambak Bayan. Ketika Komandan militer Jawa Timur, Mayor Jenderal Soemitro, pada tanggal 31 Desember 1966 mengambil tindakan sehingga menimbulkan masalah yang menyulitkan orang Tionghoa. Soemitro dengan keputusannya yang bernomor 73-76/12/1966<sup>6</sup> bertindak tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan pemerintah pusat (Jakarta).<sup>7</sup>

Keputusan Soemitro tersebut memantik orang-orang Tionghoa yang terdesak untuk melakukan perlawanan pada Maret dan April 1967 dengan berdemonstrasi. Demonstrasi tersebut tersebar di berbagai kota seperti Kediri, Situbondo,

---

<sup>5</sup>Iwan Santosa, *Peranakan Tionghoa di Nusantara: Catatan Perjalanan Dari Barat ke Timur* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 120.

<sup>6</sup>Soemitro mengeluarkan empat keputusan yang ditujukan kepada orang Tionghoa asing (termasuk orang Tionghoa tanpa kewarganegaraan maupun warga negara RRT). Keputusan tersebut adalah melarang orang Tionghoa asing melakukan perdagangan besar di kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur selain di Kota Surabaya. Kedua, melarang orang Tionghoa asing mengganti tempat tinggal mereka dari satu bagian provinsi itu ke bagian yang lain. Keputusan ketiga, mengenakan pajak per kepala senilai Rp. 2.500 (waktu itu senilai kurang lebih \$25). Keputusan keempat ialah melarang penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa dalam perekonomian, keuangan, administrasi maupun telekomunikasi. Bahkan sebelumnya, Soemitro melarang segala bentuk penerbitan surat kabar Tionghoa di Jawa Timur termasuk surat kabar berbahasa Tionghoa milik pemerintah sendiri, *Harian Indonesia*. (Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 197.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Bondowoso, Pasuruan, Probolinggo dan Surabaya. Demonstrasi ini kemudian dibalas beberapa hari setelahnya dengan huru-hara anti Tionghoa. Huru-hara hebat terjadi di Situbondo, Panarukan dan Besuki. Beribu-ribu pemuda Indonesia yang dipimpin oleh anggota front aksi membakar sebuah pabrik milik orang Tionghoa, menjarah toko dan rumah, membakar berbagai perabotan, dan memukuli setiap orang Tionghoa yang ditemui apapun kewarganegaraannya.<sup>8</sup>

Huru-hara anti Tionghoa di Surabaya yang terjadi cenderung lebih terkendali. Tidak ada kekerasan-kekerasan yang berarti selama periode tersebut karena Surabaya merupakan ibu kota provinsi yang memiliki jaminan keamanan dan ketertiban lebih baik dari pada kota-kota lainnya di Jawa Timur. Hanya saja para pedagang etnis Tionghoa menutup toko-toko mereka dalam waktu yang tidak ditentukan untuk menghindari kriminalitas di situasi yang tak menentu.

Etnis Tionghoa Tambak Bayan merespon kondisi tersebut dengan berbeda. Berbanding terbalik dengan yang terjadi secara umum di Surabaya dan kota-kota lain, suasana di Kampung Tambak Bayan cenderung lebih kondusif dan aman. Kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa. Para tukang kayu tetap bekerja di *workshop* mereka, tukang masak tetap berangkat menuju restoran tempat bekerja, dan anak-anak tetap bersekolah seperti pada umumnya.

Walaupun begitu, etnis Tionghoa Tambak Bayan tetap siaga dalam menjaga keamanan kampung. Mereka bersama warga etnis yang lain melakukan ronda malam dan menerapkan sistem jaga kampung selama 24 jam bergiliran. Di Jalan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 202.

Tambak Bayan Tengah yang merupakan jalan utama kampung Tambak Bayan, terdapat penjaga yang berjaga di tiap ujung jalan. Menariknya, selain mereka berjaga dengan warga pribumi Tambak Bayan, mereka juga mendapatkan bantuan penjagaan dari *banser* NU.<sup>9</sup>

Memang terdapat dampak-dampak minor yang dialami oleh etnis Tionghoa Tambak Bayan terkait huru-hara yang terjadi. Namun, dampak tersebut hanya merupakan reaksi individu dan tidak mencerminkan sikap kolektif kelompok dalam merespon situasi yang terjadi. Beberapa individu memutuskan untuk kembali ke RRT ketika sikap anti Tionghoa meluas. Terlebih, terdapat kabar burung akan adanya pembunuhan terhadap etnis Tionghoa. Beberapa individu yang lain memutuskan untuk mengungsi ke rumah sanak familinya di luar Tambak Bayan sampai situasi kondusif.<sup>10</sup>

Dalam lingkup kelokalan Tambak Bayan, peristiwa krisis Jawa Timur secara umum memang tidak memiliki dampak yang berarti. Apabila ditelaah, terdapat beberapa faktor mengapa dampak seperti ini bisa terjadi. Pertama adalah pembauran yang sudah terjadi sejak lama. Etnis Tionghoa Tambak Bayan telah hidup berdampingan dengan warga pribumi bahkan sejak sebelum tahun 1900-an.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Bapak Gunawan (Go Siok Woung) pada tanggal 28 agustus 2017 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.

<sup>10</sup>Seperti ayah dari Ife (Tjiong Giok Fioe) yang memutuskan untuk pulang ke RRT pada tahun 1967 dikarenakan isu-isu persekusi terhadap etnis Tionghoa yang semakin kuat. (Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Ibu Ife (Tjiong Giok Fioe) pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.

Hidup berdampingan cukup lama dengan warga pribumi tentu telah meruntuhkan sekat-sekat eksklusifitas yang ada sebelumnya.

Hidup berdampingan dengan warga pribumi menghasilkan pembauran yang berlangsung secara alami. Namun, bukan berarti pemerintah selaku regulator tidak melakukan apa-apa. Pemerintah juga berusaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebangsaan guna mempercepat proses terjadinya pembauran. Usaha tersebut sebenarnya telah terlihat sejak Orde Lama, yaitu dengan mengadakan apel siaga di Tugu Pahlawan pada tanggal 23 April 1964.<sup>11</sup>

Etnis Tionghoa Tambak Bayan berbeda dengan etnis Tionghoa di daerah lain di Surabaya. Mereka membaur dengan masyarakat lokal namun tetap mempertahankan identitas kebudayannya. Begitu juga dengan warga lokal Tambak Bayan, mereka menerima keberadaan etnis Tionghoa dan memperlakukan layaknya tetangga tanpa memandang suku, ras maupun budaya. Bahkan ketika terjadi huru-hara anti Tionghoa pada tahun 1967, masyarakat lokal Tambak Bayan justru bahu-membahu bekerjasama melindungi etnis Tionghoa Tambak Bayan dan mengamankan kampung mereka dari potensi kerusuhan.

Salah satu faktor pemersatu etnis Tionghoa Tambak Bayan dengan masyarakat pribumi adalah kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan yang sama-sama dialami menjadi sebuah ikatan kuat satu sama lain. Rasa senasib

---

<sup>11</sup>Apel Siaga disisi lain menjadi upaya pemerintah untuk mengontrol ideologi etnis Tionghoa dengan memasukkan ideologi-ideologi kebangsaan Indonesia dalam materinya. Seperti pada apel siaga di Tugu Pahlawan pada tanggal 23 April 1964 yang diikuti oleh WNI keturunan Cina, tema apel siaga tersebut adalah “Kami Adalah Bangsa Indonesia”. (“Appel Siaga WNI ket. Tionghoa di Tugu Pahlawan S.baja”, *Surabaya Post*, 20 April 1964.)

sepenanggungan sama-sama terpupuk dalam menjalani sulitnya kehidupan. Kemiskinan benar-benar menghapuskan segala batas-batas eksklusifitas dan membangun nilai-nilai solidaritas tanpa batas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Kemiskinan menjadi alasan lolosnya etnis Tionghoa Tambak Bayan dari sasaran amukan massa anti Tionghoa di Surabaya selain karena hubungan baiknya dengan warga pribumi. Pekerjaan mereka sebagai tukang kayu, tukang batu, tukang masak dan tukang besi yang berpenghasilan kecil berimbas pada kepemilikan aset berharga yang nihil. Sasaran amukan dan penjarahan massa rata-rata adalah para pedagang Tionghoa atau pemilik pabrik Tionghoa yang memiliki kekaayaan dan aset dalam jumlah besar. Kepemilikan aset berharga yang melimpah oleh etnis Tionghoa dan perekonomian yang berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian rakyat pribumi pada umumnya memicu stereotip negatif yang dialamatkan pada mereka.<sup>13</sup>

Kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pembauran oleh pemerintah pusat nyatanya menyulitkan etnis Tionghoa Tambak Bayan dalam kaitannya dengan administrasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan pergantian nama Tionghoa menjadi nama berbau Indonesia. Pada tahun 1966 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/12/1966 tentang prosedur pergantian nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Keputusan tersebut ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri Basuki

---

<sup>12</sup>Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang Kota* (Serpong: CV Marjin Kiri, 2013), hlm. 313.

<sup>13</sup>Charles A. Coppel, *op.cit.*, hlm. 203.

Rachmad dengan mengeluarkan instruksi No. 4 tahun 1967 tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Cina. Dilanjutkan dengan instruksi No. 6 tahun 1967 tentang memberi briefing kepada partai-partai politik, ormas dan sebagainya tentang ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Cina.<sup>14</sup>

Akibat dari hal itu etnis Tionghoa Tambak Bayan harus melakukan proses pergantian nama dengan biaya yang cukup tinggi. Hal itu membebani perekonomian mereka sehingga tidak semua melakukan pergantian nama pada tahun tersebut. Bahkan hingga tahun 1980an masih terdapat nama-nama Tionghoa di beberapa Kartu Keluarga (KK) milik etnis Tionghoa Tambak Bayan.

Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka telah memiliki nama Indonesia yang tidak dicatatkan karena masalah biaya. Mereka berusaha patuh terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Bagi mereka yang melakukan pergantian nama, mereka menggunakan kombinasi yang menunjukkan identitas marga mereka dan nama baru yang akan digunakan. Seperti pada Go Siok Wong. Ia mengganti namanya menjadi Gunawan dimana ada unsur Gu (Go) di depan sebagai pertanda bahwa ia marga Go. Atau pada Wong Sui King yang mengganti namanya menjadi Sugita Wijaya.

Pergantian nama ini menjadi menarik karena etnis Tionghoa Tambak Bayan yang secara kultural bukan merupakan orang Jawa atau orang Indonesia dipaksakan

---

<sup>14</sup>Bagian Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil pada Biro Bina Pemerintahan, *Himpunan Peraturan Perundangan tentang Kewarganegaraan, Asimilasi dan Orang Asing* (Jakarta: Departemen Dalam negeri, 1978), hlm. 340-346.



menggunakan nama Indonesia. Hal ini kemudian menimbulkan kerancuan pada arti nama sesungguhnya dalam bahasa Jawa ataupun Indonesia. Seperti Sugita Wijaya, nama Sugita merupakan nama yang lazim digunakan untuk perempuan. Namun nama tersebut digunakan untuk laki-laki. Kerancuan ini terjadi karena pergantian nama ini diusahakan sedemikian rupa agar nama baru mereka masih memuat identitas asli mereka yaitu nama marga.<sup>15</sup>

Namun berbeda halnya bagi generasi-generasi selanjutnya yang sejak lahir telah memiliki nama Indonesia. Tidak ada kesedihan terkait dengan nama Indonesia yang dimiliki. Penamaan Tionghoa dirasa tidak memiliki arti mendalam bagi generasi setelahnya. Keterkaitan makna antara nama Indonesia dan Tionghoa pada generasi sebelumnya juga tidak ada lagi. Sehingga, meski awalnya etnis Tionghoa cukup terdampak akibat kebijakan tersebut, tetapi anak dan keturunannya sudah tidak mempermasalahkannya lagi.

Masih di tahun 1967, setelah mengalami berbagai sikap diskriminasi terkait kebijakan Soeharto, pemerintah Orde Baru kembali mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 tanggal 6 Desember 1967 yang mengatur tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Instruksi tersebut memuat empat poin yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan ibadah, adat, dan kegiatan-kegiatan kebudayaan Cina. Instruksi tersebut dialamatkan kepada Menteri Agama, Menteri

---

<sup>15</sup> Seperti marga Liem yang kemudian mengganti nama menjadi Nursalim (Nursaliem). Nama Nursalim adalah nama yang identik dengan agama Islam, namun pemilik nama tersebut belum tentu beragama Islam. Atau nama Budi Mulya (marga Ya/Yo) yang mana nama tersebut lebih cocok sebagai nama sebuah perkumpulan atau yayasan dibanding digunakan sebagai nama orang. (Junus Jahja, *Ganti Nama* (Jakarta Pusat: Yayasan Tunas Bangsa, 1987), hlm. 28-32.)

Dalam Negeri dan segenap badan serta alat pemerintahan di pusat maupun daerah.<sup>16</sup>

Instruksi Presiden tersebut berbunyi:

1. Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadat Cina yang memiliki aspek affinitas kulturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.
2. Perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok didepan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.
3. Penentuan kategori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan tata cara ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (PAKEM).
4. Pengamanan dan penertiban terhadap kebijakan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung.<sup>17</sup>

Soeharto mengungkapkan bahwa Instruksi Presiden ini merupakan salah satu upaya pemberantasan paham komunisme di Indonesia. Instruksi tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa adat-istiadat, agama, dan kepercayaan Tiongkok yang berpusat pada leluhurnya perlu ditempatkan dalam proporsi yang wajar. Sebab dalam manifestasinya dapat memberikan pengaruh psikologis dan moril kepada masyarakat Republik Indonesia sehingga menghambat proses asimilasi yang berlangsung.

Instruksi Presiden ini berimbas pada ditutupnya sebagian klenteng-klenteng dan perkumpulan-perkumpulan milik etnis Tionghoa.<sup>18</sup> Sebagian yang lainnya

---

<sup>16</sup>“Instruksi Presiden RI ttg agama, kepertjajaan, adat-istiadat Tjina”, *Surabaya Post*, 18 Desember 1967.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Pada masa Orde Baru perkumpulan Dharma Warga juga ditutup dan gedung perkumpulan dialih fungsikan sebagai mess TNI AU. Praktis selama Orde Baru perkumpulan Dharma Warga tidak melakukan kegiatan apapun. Namun ternyata TNI AU masih memberikan kelonggaran terhadap pengurus perkumpulan Dharma Warga dengan mengizinkan salah satu ruangan di gedung perkumpulan untuk digunakan sebagai ruang praktek dokter guna melayani masyarakat yang sakit. (Wawancara dengan wakil ketua pengurus perkumpulan Dharma Warga

mengganti namanya menjadi nama-nama khas Indonesia. Perayaan-perayaan hari besar Tionghoa seperti Imlek, Cap Go Meh dan lain-lain sudah tidak dapat dirayakan secara meriah dan besar-besaran.

Etnis Tionghoa di Tambak Bayan dalam menyikapi kebijakan tersebut cenderung pasrah dan menerima. Entah kenapa mereka memiliki kesadaran atas kelemahan posisi mereka pada era Orde Baru. Jiwa kepasrahan mereka terbentuk karena selain mereka adalah etnis Tionghoa, mereka juga tidak memiliki kekuatan politik apapun untuk melawan karena berstatus sebagai orang miskin.

Sejatinya, etnis Tionghoa Tambak Bayan dalam merayakan dan melaksanakan upacara keagamaan serta kebudayaan sudah cukup mengalami kesulitan dengan atau tanpa adanya kebijakan tersebut. Perayaan kebudayaan dan upacara keagamaan cenderung menelan biaya yang cukup besar dan kerap kali tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Tetapi bagaimanapun juga, mereka memiliki keyakinan untuk tetap melaksanakan kegiatan keagamaan dan perayaan kebudayaan dalam kondisi apapun sebagai representasi penghormatan terhadap leluhur.<sup>19</sup>

Berbeda dengan kelompok etnis Tionghoa lain seperti di Kapasan dan Kembang Jepun, perayaan hari-hari besar seperti Imlek di Tambak Bayan tidak terlalu terdampak Instruksi Presiden No. 14. Sebab perayaan Imlek etnis Tionghoa

---

Surabaya bapak Ken Kriswanto (Den Jian Kang) pada 2 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB di kantor Perkumpulan Dharma Warga.)

<sup>19</sup>H.G Creel, *Alam Pikiran Cina Sejak Confucius Sampai Mao Zedong*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 275-277.

Tambak Bayan sejak sebelum era Orde Baru sudah dilaksanakan secara sederhana. Kesederhanaan dalam tata-cara pelaksanaan yang hanya dirayakan di dalam rumah baik itu persembahyangan maupun pesta makan-makan tentu secara prinsip tidak melanggar Instruksi Presiden No. 14.

Disamping upacara keagamaan lain, perayaan Imlek meski telah dibalut dengan kesederhanaan ternyata masih membebani beberapa orang secara ekonomi. Kesulitan menyelenggarakan upacara keagamaan dikarenakan mahalannya harga properti dan perlengkapan upacara. Hal ini disikapi cukup ekstrim oleh beberapa etnis Tionghoa Tambak Bayan dengan berpindah agama. Mayoritas perpindahan agama adalah menuju agama Kristen.<sup>20</sup> Perpindahan agama ini jelas menggambarkan ciri oportunistis dari etnis Tionghoa Tambak Bayan.

Mahalannya harga properti dan perlengkapan upacara pada dasarnya bukan satu-satunya alasan perpindahan agama etnis Tionghoa Tambak Bayan. Perpindahan agama dari Khonghucu ke Kristen juga terkait dengan tidak diakuinya Khonghucu sebagai agama sesuai Instruksi Presiden Soeharto No.1470 Tahun 1978. Inpres ini diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.477/740554/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978.<sup>21</sup> Hal ini kemudian membuat etnis Tionghoa Tambak Bayan yang masih beragama Khonghucu tidak

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Bapak Wijaya (Wong Sui King) pada tanggal 6 mei 2018 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.

<sup>21</sup>Rustono Farady Marta, "Polemik Kebhinnekaan Indonesia pada Informasi Instagram @Infia\_Fact Terkait Patung Kwan Sing Tee Koen Tuban", *Jurnal Bricolage*, Vol. 3 No. 2, hlm. 64.

mendapatkan fasilitas dari pemerintah terkait jaminan dan kemudahan dalam menjalankan ajaran agamanya.

Namun, permasalahan muncul berkaitan dengan administrasi yang juga berpengaruh terhadap pengamalan Agama Khonghucu. Aksara kitab-kitab Khonghucu dilarang menggunakan huruf Mandarin dan harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia tanpa memperlihatkan aksara aslinya. Penulisan Agama Khonghucu dalam kolom KTP maupun kartu keluarga pun tidak bisa dilakukan karena tidak diakui oleh pemerintah. Apabila dipaksakan dituliskan, maka akan mempersulit diri sendiri dan keluarga. Mereka akan dipersulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti kesulitan dalam mendapatkan catatan perkawinan di pencatatan sipil dan mendapatkan akte kelahiran bagi anak.<sup>22</sup>

Hal unik terjadi di Kampung Tambak Bayan yang menggambarkan reaksi oportunistis guna mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Bagaimanapun juga umat Khonghucu dihadapkan pada dilema. Di satu sisi apabila mencatatkan agama yang berbeda pada kolom KTP atau kartu Keluarga sama saja dengan membohongi nurani dan tuhan, di sisi lain apabila tidak dilakukan maka hak-hak mereka sebagai warga negara tidak bisa didapatkan. Pada akhirnya, mereka memilih untuk mengisi kolom agama dengan agama lain namun tetap berkeyakinan

---

<sup>22</sup>Daud Ade Nur Cahyo, "Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa", *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dhrama, 2016), hlm. 59.

dan menjalankan ajaran agama Khonghucu dengan menyerahkan semuanya kepada tuhan.<sup>23</sup>

Sekolah juga berperan penting dalam proses perpindahan agama etnis Tionghoa Tambak Bayan. Tekanan-tekanan yang masif terhadap penganut agama Khonghucu melandasi pemikiran dan kemungkinan berpindah agama bagi mereka. Opsi paling mungkin saat itu adalah agama kristen. Diiringi dengan ditutupnya sekolah-sekolah Baperki dan sekolah berbahasa Tionghoa pada tahun 1965-1966 membuat mereka memindahkan anaknya ke sekolah-sekolah Kristen.<sup>24</sup> Ketertarikan mereka terhadap sekolah Kristen adalah selain murah dan memiliki jenjang pendidikan tinggi, sekolah tersebut juga kerap memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari berupa beras kepada wali murid yang kurang mampu.

Pada dasarnya tidak ada bukti jelas bahwa sekolah-sekolah kristen berperan besar dalam perpindahan agama anak-anak etnis Tionghoa Tambak Bayan yang bersekolah disana. Namun, sekolah-sekolah kristen memiliki peran penting dalam memperkenalkan anak-anak etnis Tionghoa Tambak Bayan menuju agama kristen. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu gerbang utama masuknya anak-anak etnis Tionghoa Tambak Bayan ke agama kristen adalah dengan melalui sekolah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>“Beberapa dari mereka memang benar-benar berpindah agama dengan pergi ke gereja dan mengikuti peribadatan Kristen. Sedang yang lain hanya formalitas saja. Mereka juga melakukan sembahyangan terhadap leluhur di rumah dan juga merayakan perayaan kebudayaan Tiongkok.” (Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Suseno Karja pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.)

<sup>24</sup>Charles A. Coppel, *op.cit.*, hlm. 211.

<sup>25</sup>Secara umum terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap pemeluk agama Kristen di Indonesia pada dalam rentang tahun 1933 hingga tahun 1980. Pada tahun 1933 hanya sekitar 2,8 persen rakyat Indonesia yang beragama Kristen. Pada sensus tahun 1971 tercatat sebanyak 7,4 persen rakyat Indonesia beragama Kristen dan pada tahun 1980 terdapat sekitar 8,8 persen. (M.C.

Salah satu pengurus sekolah di Surabaya dengan mayoritas murid Tionghoa memberikan gambaran mengenai agama yang dianut muridnya. Pada tahun 1966 hingga 1968 terjadi penurunan signifikan terhadap penganut agama Khonghucu dan kenaikan terhadap penganut agama kristen.<sup>26</sup>

**Tabel 3. 1 Persentase Siswa Pemeluk Agama di Salah Satu Sekolah Mayoritas Tionghoa Surabaya**

<b>JUMLAH PENGANUT AGAMA</b>	<b>Tahun 1966</b>	<b>Tahun 1968</b>
Khonghucu (termasuk beberapa orang dari agama Budha)	50%	35%
Protestan	40%	50%
Katolik	9%	14%
Islam	1%	1%

Sumber: Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 209.

Di Kampung Tambak Bayan, tercatat dari total 108 etnis Tionghoa Tambak Bayan pada tahun 1983-1998 terdapat 43 orang beragama Kristen, 29 orang beragama Buddha, 18 orang beragama Khonghucu, 16 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Katolik.<sup>27</sup> Agama Kristen menjadi agama mayoritas yang dianut oleh etnis Tionghoa Tambak Bayan. Mereka yang beragama Kristen sebelumnya beragama Khonghucu atau Buddha. Perpindahan agama ini oleh sebagian besar etnis Tionghoa Tambak Bayan tidak terlalu dipermasalahkan karena para missionaris Kristen sendiri juga banyak membantu perekonomian mereka.

---

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 435-536.

<sup>26</sup>Charles A. Coppel, *op.cit.*, hlm. 209.

<sup>27</sup>Diolah dari 64 Kartu Keluarga etnis Tionghoa Tambak Bayan terbitan tahun 1983-1998.

Sebelum bersekolah di sekolah-sekolah Kristen, etnis Tionghoa Tambak Bayan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Tionghoa yang tersebar di Surabaya seperti sekolah Nan Hwa (setara SD) di Jalan Bunguran, sekolah Kachung Siauw (setara SD) di jalan Sulung, sekolah Fu Chung (setara SMP & SMA) di Jalan Indrapura dan sekolah-sekolah Tionghoa lainnya. Setelah sekolah-sekolah itu ditutup mereka kemudian berpindah ke sekolah-sekolah Kristen seperti Petra dan YPPI. Selama bersekolah disana mereka berkenalan dengan agama Kristen melalui kultur sekolahan dan mata pelajaran agama Kristen.

Penutupan sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa berdampak pada tingkat pendidikan etnis Tionghoa Tambak Bayan. Ketika sekolah-sekolah tersebut ditutup, mereka sebenarnya ingin menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Indonesia. Namun, kuota di sekolah-sekolah tersebut terbatas dan prioritas diutamakan kepada anak-anak warga pribumi sehingga beberapa warga Tambak Bayan mengalami putus sekolah.<sup>28</sup> Beberapa warga menamatkan sekolahnya pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan beberapa yang lain dapat melanjutkan sekolah kembali ke jenjang lebih tinggi setelah sekitar 2 tahun tidak mendapatkan pendidikan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Setelah instruksi presiden no. 14 tahun 1967, praktis sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa ditutup. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan presiden No. B 12/Pres./1/1968 yang memberikan izin untuk mendirikan sekolah yang disponsori oleh golongan swasta dalam masyarakat Tionghoa. Sekolah itu dinamakan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPC) yang berdiri pada tahun 1969. Selama interval 2 tahun antara tahun 1967 hingga didirikannya sekolah-sekolah SNPC pada tahun 1969 banyak etnis Tionghoa yang tidak mendapatkan akses pendidikan. (Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), hlm. 162).

<sup>29</sup>Prioritas terhadap warga pribumi berlanjut hingga tingkat pendidikan tinggi. Sugita Wijaya mengisahkan bahwa dirinya pada tahun 80an mendaftarkan diri ke Universitas Airlangga. Ia lulus tes tulis namun kemudian tidak lulus administrasi karena namanya, Wong Sui King,



Dari 64 Kartu Keluarga (KK) etnis Tionghoa Tambak Bayan terbitan tahun 1983-1998 didapatkan informasi bahwa mayoritas pendidikan terakhir etnis Tionghoa Tambak Bayan pada waktu itu adalah Sekolah Dasar (SD). Dari total 103 orang penghuni kampung Tambak Bayan sejumlah 48 orang berpendidikan terakhir SD, 26 orang berpendidikan terakhir SMP, 20 orang berpendidikan terakhir SMA dan 9 orang tidak sekolah atau tidak tercatat. Dilihat dari tahun lahir mereka dan usia normal anak-anak masuk SD, mereka rata-rata lulus SD pada tahun 1966-1970 dimana ketika itu pendidikan terhadap etnis Tionghoa masih vakum. Hal ini membuktikan bahwa dampak dari penutupan sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa berdampak paling besar pada etnis Tionghoa miskin.<sup>30</sup>

Etnis Tionghoa Tambak Bayan walaupun hidup dalam kemiskinan namun memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Prinsip hidup mereka adalah memperjuangkan segalanya dalam semua aspek kehidupan untuk anak. Mereka menabung dan menyimpan sebagian besar pendapatannya dan mengalokasikan untuk pendidikan anak-anak mereka.

“Kita ini walaupun miskin tetapi selalu bekerja keras. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Kita memang miskin tapi kita mengusahakan bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak miskin seperti orang tuanya. Kita bekerja selalu berhemat. Uang selalu disisihkan dan makan secukupnya. Sisa uang ditabung untuk sekolah anak-anak”<sup>31</sup>

---

merupakan nama Tionghoa (Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Bapak Wijaya (Wong Sui King) pada tanggal 6 mei 2018 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan).

<sup>30</sup>Diolah dari 64 Kartu Keluarga etnis Tionghoa Tambak Bayan terbitan tahun 1983-1998.

<sup>31</sup>Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Bapak Wijaya (Wong Sui King) pada tanggal 6 mei 2018 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.

Merupakan sebuah kontradiksi bagaimana mereka pasrah dengan berbagai stereotip yang dialamatkan pada mereka, pasrah dengan berbagai kebijakan rasial yang dibuat oleh pemerintah, dan pasrah terhadap takdir kemiskinan yang mereka alami, namun begitu militan dan berjuang habis-habisan untuk pendidikan anak-anak mereka. Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengubah nasib menjadi lebih baik dan mengupayakan itu sebisa mungkin. Setidaknya apabila nasib orang tua tidak bisa berubah, maka nasib anak yang harus berubah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pekerjaan, etnis Tionghoa Tambak Bayan terbilang cukup *aman* dari dampak-dampak kebijakan pemerintah dan stereotip masyarakat terhadap etnis Tionghoa secara umum. Hal yang mendasarinya adalah karena mereka bekerja di sektor-sektor non-formal. Posisi pekerjaan mereka yang sejajar dengan pekerjaan rata-rata masyarakat pribumi, baik dari segi penghasilan maupun dari segi derajat pekerjaan beserta resiko yang mengikutinya memperkuat hal itu.<sup>32</sup>

Keahlian mereka dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti tukang kayu membuat mereka mendapatkan posisi dan nilai tawar tersendiri di mata masyarakat pribumi. Walaupun terdapat stereotip negatif terhadap etnis Tionghoa, namun masyarakat pribumi tetap mengandalkan tukang kayu etnis Tionghoa untuk masalah perkayuan guna mendapatkan hasil terbaik. Bahkan tidak jarang tukang kayu pribumi meniru dan belajar kepada tukang kayu Tionghoa untuk

---

<sup>32</sup>Mulyanto Sumardi & Hans-Dieter Evers, ed. *Kemiskinan dan kebutuhan pokok*, (Jakarta: CV. RaJawali, 1982), hlm. 158-159.

mengembangkan dan memperluas pengetahuannya. Keahlian ini juga sebagai pintu gerbang pembauran, pengakuan, dan penerimaan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa Tambak Bayan ditengah gejolak yang ada.

Para tukang kayu ini kemudian mengantarkan kampung Tambak Bayan dikenal sebagai kampung tukang kayu sejak tahun 1950-an. Tukang kayu Tambak Bayan fokus pada pembuatan perabot-perabot rumah seperti lemari, meja, kursi, bahkan pigura.<sup>33</sup> Di tahun 1960-1980an terdapat tiga *workshop* tukang kayu besar di Kampung Tambak Bayan dan berpusat di sekitar istall kuda. Disamping itu, terdapat puluhan *workshop-workshop* kecil milik tukang kayu yang kebanyakan dikerjakan di dalam rumahnya atau di sekitar Istall Kuda.<sup>34</sup>

Walaupun begitu pekerjaan sebagai tukang kayu bukanlah sebuah pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Mereka menekuni pekerjaan sebagai tukang kayu karena memang hanya itu keahlian mereka disamping alasan historis dan kultural. Salah satu pengrajin pigura, Ong Thian Tjo menceritakan bahwa omzetnya perbulan pada tahun 60-an adalah sekitar lima belas ribu rupiah dengan keuntungan bersih sekitar tiga ribu rupiah.<sup>35</sup>

Perjuangan untuk memperbaiki nasib lewat pendidikan mulai terlihat pada tahun 1980an dimana salah satu indikatornya adalah komposisi para tukang kayu

---

<sup>33</sup>Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, (Jakarta: Garba Budaya, 1998), hlm. 192.

<sup>34</sup>Diolah dari Arsip Kotapraja Surabaya tahun 1958-1966 tentang Surat Izin Mendirikan Pertukangan Kayu di Jl. Tambak Bayan Gg VII/1-3 Surabaya a.n. Pang Khai Hien pada tanggal 30 Mei 1961.

<sup>35</sup>*Ibid.*

mulai berkurang. Perkembangan ekonomi di awal tahun 1980an terlihat dari pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 32 orang, pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 25 orang, dan pekerjaan sebagai tukang kayu sebanyak 4 orang dari total 61 kepala keluarga pada tahun 1983-1998.<sup>36</sup>

Dari statistik tersebut, telah terjadi perbaikan nasib yang cukup signifikan dari 20 tahun sebelumnya. Para pegawai swasta pada tahun tersebut merupakan para anak-anak yang bersekolah di tingkat dasar dan menengah di tahun 1966-1970an. Perjuangan mereka untuk mendapatkan pendidikan ditengah kesulitan pada tahun tersebut berbuah pada pekerjaan yang cukup tinggi derajatnya dibanding pekerjaan orang tua mereka sebagai tukang kayu.

Pekerjaan sebagai tukang kayu mulai ditinggalkan pada tahun 1990an. Terdapat beberapa alasan yang membuat para etnis Tionghoa Tambak Bayan meninggalkan pekerjaan tukang kayu yang merupakan pekerjaan turun temurun bagi mereka. Alasan pertama adalah modernisasi. Para tukang kayu menggunakan alat-alat manual tradisional sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengerjakan pesanan dan menghasilkan jumlah produksi tidak terlalu banyak. Seiring perkembangan zaman, banyak diciptakan mesin-mesin pertukangan yang bisa menghasilkan produksi lebih banyak dari pada hasil tangan manual dan berbiaya lebih murah serta lebih efisien waktu.

---

<sup>36</sup>Pekerjaan sebagai pegawai swasta meliputi tukang masak, sales, pegawai bank, karyawan pabrik, dan karyawan toserba. Pekerjaan sebagai wirausaha meliputi berjualan kelontong, berjualan makanan, tukang besi, tukang kayu (pemilik *workshop*), PRT, tukang cuci dan lain sebagainya. (diolah dari 64 Kartu Keluarga etnis Tionghoa Tambak Bayan terbitan tahun 1983-1998).

Alasan kedua adalah penghasilan. Tidak dapat dipungkiri, penghasilan sebagai tukang kayu memanglah pas-pasan. Penghasilan sebagai tukang kayu hanya cukup untuk menghidupi keluarga dan sangat sedikit sisa uang yang dapat ditabung. Dengan penghasilan seperti itu ditambah dengan pesanan yang semakin sedikit sebab modernisasi, mereka semakin terhimpit secara perekonomian.

Alasan ketiga adalah regenerasi. Pada tahun 1980 hingga 1990an merupakan tahun-tahun regenerasi etnis Tionghoa Tambak Bayan. Generasi sebelumnya yang banyak bekerja di sektor tukang kayu sudah memasuki masa pensiun. Anak-anak generasi selanjutnya yang memasuki usia kerja memilih bekerja di menjadi pegawai karena memiliki pendidikan yang cukup dan jaminan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Beberapa dari mereka bahkan ketika telah mendapatkan kestabilan ekonomi memilih untuk pindah keluar dari kampung Tambak Bayan.

Generasi-generasi etnis Tionghoa Tambak Bayan yang lahir pada tahun 1940-1950an dan mencapai kedewasaan pada tahun 1980-1990an mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia. Rasa nasionalisme mereka sama kuat bahkan dalam beberapa aspek cenderung lebih kuat dari masyarakat pribumi itu sendiri. Namun, mereka masih terganjal sikap-sikap dan peraturan pemerintah yang diskriminatif sehingga kurang bisa leluasa dalam berkehidupan sehari-hari.

“Kami ini orang Indonesia. Kami lahir, hidup, bekerja dan tinggal di Indonesia. Memang kami keturunan orang Cina tetapi tanah air kami adalah Indonesia. Apa lagi pernah perdana menteri kami mengatakan bahwa kalian orang Tionghoa yang lahir di Indonesia,

kalian bukan orang RRT tetapi kalian orang Indonesia. Maka bekerja dan berkontribusilah lah untuk memajukan negara kalian.”<sup>37</sup>

Salah satu penghambat mereka dalam berkehidupan sehari-hari adalah proses administrasi kewarganegaraan. Pada tahun 1979, kantor kejaksaan negeri mengadakan *pendaftaran ulang* semua orang keturunan Tionghoa, baik yang asing maupun yang berkewarganegaraan Indonesia. Prosedur ini sangat melukai perasaan WNI keturunan Tionghoa. Mereka (bersama orang Tionghoa asing) tidak hanya diharuskan mengisi formulir panjang dengan harga cukup mahal, tapi mereka juga diperlakukan sama dengan Tionghoa asing.<sup>38</sup>

Tampaknya, pendaftaran orang asing Tionghoa itu merupakan suatu langkah persiapan dalam dua perubahan besar kebijakan terhadap minoritas Tionghoa pada tahun 1980. Pada tahun itu presiden mengeluarkan instruksi (Instruksi Presiden no. 2 tahun 1980) mengenai pemindahan kewenangan penerbitan setifikat WNI yang sebelumnya ada pada pengadilan negeri dilimpahkan pada camat setempat. Tindakan kedua adalah diterbitkannya Keputusan Presiden no. 13 tahun 1980 yang memberikan kesempatan kepada Tionghoa asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Kedua keputusan ini menyederhanakan syarat untuk menjadi WNI dengan proses minimal tiga bulan dan maksimal tiga tahun. Proses tersebut juga dikenakan biaya administrasi minimum Rp 30.000,00 dan maksimum Rp

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Bapak Wijaya (Wong Sui King) pada tanggal 6 mei 2018 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.

<sup>38</sup>Charles A. Coppel, *op.cit.*, hlm. 296.

100.000,00. Penentuan besaran biaya administrasi diusahakan tidak melebihi penghasilan bulanan pemohon.<sup>39</sup>

Sekalipun usaha untuk mendapatkan status warga negara Indonesia telah dipermudah, namun tetap saja hal itu sulit bagi etnis Tionghoa miskin Tambak Bayan. Kesulitan tersebut terletak pada biaya yang dibebankan. Biaya sebesar itu tentu melebihi kemampuan mereka sehingga pada tahun 1980an masih banyak etnis Tionghoa Tambak Bayan yang berkebangsaan WNA.

Sebanyak 67 orang dari 101 etnis Tionghoa Tambak Bayan merupakan Warga Negara Indonesia, sedangkan 34 sisanya masih berkebangsaan Cina. Kewarganegaraan WNI biasanya didapat ketika terjadi perkawinan silang antara etnis Tionghoa dan penduduk pribumi. Sedangkan mereka yang masih *totok* pada akhirnya harus mengurus proses kependudukan dengan biaya tinggi sehingga banyak dari mereka memilih tidak melakukannya dan tetap pada kewarganegaraan Tiongkok.<sup>40</sup>

Seperti yang terjadi pada keluarga Go Liem Nio, ia dan ketujuh anaknya tinggal di Kampung Tambak Bayan. Bahkan ia dan kesemua anaknya lahir di Surabaya, namun pada tahun 1983 masih berkewarganegaraan Cina dan beragama Khonghucu.<sup>41</sup> Kasus yang sama terjadi pada keluarga Tjong Sia Hoo. Ia merupakan kelahiran RRC tepatnya di daerah SinHwee dan mendapatkan istri Tionghoa

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Diolah dari 64 Kartu Keluarga etnis Tionghoa Tambak Bayan terbitan tahun 1983-1998.

<sup>41</sup>Diolah Dari Kartu Keluarga Go Liem Nio terbitan tahun 1983.

kelahiran Surabaya bernama Njoo Fien Nio. Mereka berdua beserta keenam anaknya berkewarganegaraan Cina karena mengikuti kewarganegaraan Tjong Sia Hoo. Tjong Sia Hoo sendiri bekerja sebagai tukang kayu dan beragama Buddha.<sup>42</sup>

Selama masa Orde Baru, Kampung Tambak Bayan terutama bagian Istall Kuda dihuni oleh etnis Tionghoa baik yang sudah berkewarganegaraan Indonesia ataupun yang masih berkewarganegaraan asing. Mereka hidup bergotong rotong satu sama lain. Warga Tambak Bayan memiliki ikatan yang kuat antar sesama etnis Tionghoa dikarenakan semua hal terkait kondisi kampung mereka dilakukan bersama-sama.

Tidak ada jaminan kesehatan dari pemerintah yang bisa dirasakan oleh mereka sehingga apabila mereka jatuh sakit maka mereka akan mengandalkan kerabat mereka untuk membantu merawat dan berhutang untuk sekedar membeli obat. Ketiadaan jaminan kesehatan tersebut juga merupakan dampak dari administrasi terkait status kewarganegaraan mereka. Poernomo Kasidi yang menjabat sebagai Walikota Surabaya menggalakkan kebijakan pembersihan sungai-sungai dan kampung-kampung agar sehat dan asri, namun kampung Tambak Bayan dan Istall Kuda sama sekali tidak tersentuh. Satu-satunya proyek pemerintah adalah pengaspalan Jalan Tambak Bayan Tengah pada masa walikota Moehadji Widjaja setelah sebelumnya hanya berupa jalan tanah (makadam).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Diolah Dari Kartu keluarga Tjong Sia Hoo terbitan tahun 1988.

<sup>43</sup>Wawancara dengan warga Tambak Bayan, Suseno Karja pada tanggal 6 mei 2018 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.



Pemerintah baru memberikan perhatiannya kepada kampung Tambak Bayan terkait statusnya sebagai kampung kuno di Surabaya. Pemerintah kotamadya Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan terkait penetapan kawasan Cagar Budaya. SK tersebut sebenarnya ditujukan untuk Kampung Kepatihan dikarenakan catatan historisnya sebagai kampung yang telah berdiri sejak zaman Kadipaten. SK bernomor 188.45/0004/402.1.04/1998 juga di klaim berlaku untuk Kampung Tambak Bayan karena merupakan bagian dari Kampung Kepatihan secara historis dan geografis.<sup>44</sup> Hingga pada akhirnya SK ini diperkuat dengan penetapan istall kuda di Tambak Bayan sebagai bangunan Cagar Budaya pada tahun 2012.<sup>45</sup>

Terdapat pula upaya pemerintah dalam usaha asimilasi dengan memberikan Penataran P4 pola pendukung 25 jam kepada warga WNI keturunan sejumlah 125 orang di Kelurahan Kedungdoro selama 5 hari terhitung mulai hari senin 13 Maret 1989 hingga jum'at 17 Maret 1989.<sup>46</sup> Penataran P4 ini diselenggarakan dalam rangka Bulan Bakti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).<sup>47</sup> Tidak hanya di kelurahan Kedungdoro, etnis Tionghoa Tambak Bayan juga mendapatkan hal

---

<sup>44</sup>Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/0004/402.1.04/1998.

<sup>45</sup>Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor: 646/877/436.6.14/2012.

<sup>46</sup>Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) merupakan program nasional pemerintah Orde Baru dalam rangka upaya pembudayaan Pancasila di setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa warga Indonesia. (Margono, Karakteristik Proses Belajar Mengajar Penataran P4 Pola 45 Jam Bagi Mahasiswa Baru: Studi Kualitatif Tentang Penataran P4 Pola 45 Jam Bagi Mahasiswa Baru di IKIP Malang, Thesis, 2013, Universitas Pendidikan Indonesia. Hlm. 31.)

<sup>47</sup>“P4 Kedungdoro”, *Surabaya Post*, 15 Maret 1989.

yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat penataran P4 yang dimiliki oleh beberapa dari mereka setelah mengikuti program tersebut.<sup>48</sup>

Etnis Tionghoa juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya adalah pelantikan sebanyak 117 orang yang terdiri dari penduduk WNI keturunan Cina di Kotamadya Surabaya. WNI keturunan Cina tersebut berasal dari Kecamatan Semampir, Pabean Cantikan, Tandes dan Bubutan. Dalam pidato sambutannya, walikotamadya Surabaya Moehadji Widjaja mengatakan bahwa tidak ada hal yang istimewa dari pelantikan hansip keturunan Cina ini. Sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki kewajiban yang sama dengan warga pribumi. Moehadji juga memerintahkan setelah pelantikan ini agar mereka membaurkan diri dengan anggota hansip yang lain.<sup>49</sup>

Permasalahan-permasalahan pembauran dan kependudukan yang dirasakan oleh etnis Tionghoa berhulu pada permasalahan administrasi dalam kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga melakukan upaya-upaya persuasif terhadap etnis Tionghoa agar mau menerima kebijakan administratif yang terkesan diskriminatif. Salah satunya adalah upaya wakil presiden Try Sutrisno yang menghimbau agar warga Tionghoa tidak terjebak pada ganjalan administrasi dan fokus pada kontribusi terhadap negara.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Diolah dari sertifikat penataran P4 milik warga Tambak Bayan Suseno Karja tahun 1990.

<sup>49</sup>“117 Hansip keturunan Cina Dilantik”, *Surabaya Post*, 7 Februari 1981.

<sup>50</sup>Try Sutrisno mengakui masih terdapat perbedaan yang terlihat dengan pemberian KTP bertanda khusus untuk warga keturunan. Namun ia mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah untuk mempermudah proses administrasi saja. (“Warga Keturunan Cina Jangan Terjebak Ganjalan Administrasi”, *Surabaya Post*, 12 september 1991.)

Untuk mengatasi permasalahan perumahan, pemerintah kotamadya Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah no. 08 tahun 1990. Perda tersebut mengatur mekanisme tinggal warga Surabaya di rumah atau tempat yang statusnya dalam pengawasan Kepala Daerah. Mayoritas bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang tak bertuan masuk dalam bangunan yang diawasi. Bangunan-bangunan tersebut ditempati secara *sporadis* oleh warga Surabaya yang tergusur dan kalah dalam perebutan ruang kota.<sup>51</sup>

Bangunan istall kuda di Kampung Tambak Bayan merupakan salah satu bangunan yang masuk dalam pengawasan Kepala Daerah Kotamadya Surabaya melalui Dinas Perumahan Daerah. Etnis Tionghoa yang tinggal didalamnya tentu memerlukan legalitas dalam menempati tempat tersebut. Pemerintah kemudian mengeluarkan SIP (Surat Izin Perumahan) berdasarkan perda tersebut. SIP ini merupakan bukti legalitas atas hak mereka menempati bangunan tersebut. Tentu saja dengan memiliki SIP ini etnis Tionghoa yang tinggal didalamnya memiliki kewajiban untuk membayar sewa bulanan kepada Dinas Perumahan DAERAH.<sup>52</sup>

Pemerintah Kotamadya Surabaya selama Orde Baru melakukan beberapa mekanisme dalam mengakomodir keberadaan etnis Tionghoa miskin di Surabaya termasuk di Kampung Tambak Bayan. Upaya pemerintah daerah tersebut meneruskan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait masalah etnis Tionghoa.

---

<sup>51</sup>Diolah dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

<sup>52</sup>Diolah dari Surat Izin Perumahan (SIP) warga penghuni Istall Kuda Tambak Bayan Tio Hwa Hing (Hendrik Tumbelaka) yang diterbitkan tahun 1998 dan Surat Izin Perumahan (SIP) NY. JD. Tio. A Tjiong-Go Liem Nio yang diterbitkan tahun 1991.

Pemerintah juga melakukan upaya mengatasi ledakan penduduk dan masyarakat urban dimana etnis Tionghoa miskin juga masuk dalam kategori tersebut.

### **3.2 Upaya Etnis Tionghoa Tambak Bayan dalam Mempertahankan Kebudayaan**

Sebagai sebuah kelompok masyarakat, etnis Tionghoa Tambak Bayan tentu memiliki nilai-nilai dan pandangan hidup berupa kebudayaan. Hal ini merupakan perwujudan dari pengertian kebudayaan itu sendiri sebagai segala daya, upaya dan aktifitas manusia untuk mengolah, beradaptasi dan mengubah alam. Aspek kebudayaan menyangkut seluruh kehidupan manusia baik materil maupun non materil.<sup>53</sup>

Etnis Tionghoa Tambak Bayan sangat menjunjung tinggi kebudayaan dan adat-istiadat nenek moyang mereka. Hal ini terlihat bagaimana mereka tetap berusaha untuk menjalankan dan menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan dan kebudayaan dalam kondisi apapun. Himpitan ekonomi dan tekanan politik tidak membuat mereka serta-merta meninggalkan kebudayaan mereka. Bahkan walaupun berganti agama, mereka tetap melaksanakan adat-istiadat nenek moyang mereka. Himpitan ekonomi dan tekanan politik tersebut justru menghasilkan keunikan dalam tata cara mereka beribadah. Berbagai penyesuaian dan *modifikasi* dilakukan agar mereka tetap bisa menjalankan kegiatan tanpa mendapatkan tekanan dari pemerintah.

---

<sup>53</sup>Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27-28.

Salah satu budaya yang masih dilestarikan oleh etnis Tionghoa Tambak Bayan adalah perayaan tahun baru Imlek. Imlek merupakan perayaan wajib dan terpenting bagi seluruh etnis Tionghoa. Pada dasarnya, Hari Raya Imlek merupakan hari raya pergantian tahun dalam penanggalan Cina. Perayaan Imlek dilakukan secara meriah dan penuh kegembiraan dengan harapan kemakmuran dan kebahagiaan yang akan didapat di tahun selanjutnya.

Perayaan Imlek pada masa Orde Baru praktis dilarang dilakukan secara meriah dan di tempat umum. Maka etnis Tionghoa Tambak Bayan merayakan Imlek dengan sederhana di kediaman masing-masing. Walaupun dilaksanakan secara sederhana tetapi tidak mengurangi kesakralan dari perayaan tersebut. Bahkan justru ketika Imlek dirayakan dengan penuh kesederhanaan, maka nilai-nilai kekeluargaan dan kesakralan akan semakin kuat.

Etnis Tionghoa Tambak Bayan mayoritas adalah orang *Hakka* dimana mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dibanding suku lain di Tiongkok dalam merayakan hari raya Imlek. Sehari sebelum hari raya Imlek, mereka melakukan sembahyangan menghadap timur yang merupakan simbol rasa syukur terhadap Dewa Langit atas segala berkah yang diberikan kepada keluarga mereka. Sembayang juga dilakukan terhadap Dewa Bumi untuk mensyukuri berkah yang sudah mereka terima.

Sebelum melakukan sembahyangan, mereka mempersiapkan altar di depan rumah beserta perlengkapan sembahyangan atau *sesajen*. Terdapat tiga sesajen inti yang wajib ada dalam upacara ini yaitu ayam, babi, dan ikan. Selain itu, terdapat

juga beberapa jenis buah-buahan dan sayur-mayur serta jajanan pasar untuk *sesajen*. Sajian minuman berupa *Yo Sua* atau arak juga di persembahkan kepada Dewa Langit.

Dalam prosesi tersebut, mereka berdoa dan membakar kertas yang merupakan simbol uang. Pembakaran kertas ini merupakan simbol penghormatan mereka terhadap para leluhur yang sedang hadir dalam ritual mereka. Tentu ritual sembahyangan ini tidak semua bisa melakukannya dikarenakan keterbatasan ekonomi dan tempat. Bagi mereka yang tidak dapat melakukan ritual tersebut, maka cukup melakukan sembahyangan sederhana di altar keluarga masing-masing di dalam rumah.

Salah satu etnis Tionghoa yang masih bisa melakukan ritual ini adalah Liang Mie Yen. Ia adalah generasi kedua di keluarganya yang masih melakukan ritual sembayangan secara runtut dan lengkap sesuai dengan ajaran para leluhurnya. Yen masih mempertahankan tradisi ini dalam keluarganya karena didukung kondisi ekonomi yang cukup dan juga kepeduliannya terhadap ritual-ritual yang diajarkan oleh para leluhurnya. Yen mempercayai bahwa dengan melakukan sembayangan secara lengkap dan benar, maka keberuntungan akan datang padanya. Sembayangan ini dilakukan oleh Yen di ruang tamu rumahnya dengan menaruh sebuah meja tepat di depan pintu.

Dalam perayaan Imlek orang *Hakka*, mereka memiliki ritual makan malam bersama seluruh keluarga besar di hari kedelapan setelah Imlek berlangsung. Momen ini merupakan momen reuni dan mengeratkan tali kekeluargaan kembali

setelah selama satu tahun terpisah.<sup>54</sup> Etnis Tionghoa Tambak Bayan mengadakan makan malam bersama keluarga besar di malam Tahun Baru Imlek. Seperti yang terjadi pada keluarga besar Liong (marga Liong), mereka berkumpul di malam tahun baru Imlek untuk makan bersama dan bersilaturahmi. Berbagai masakan dihidangkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang didapat pada tahun ini. Selama prosesi makan malam, mereka menyalakan lilin di altar leluhur mereka dengan harapan leluhur mereka juga hadir dan ikut menyantap sajian yang mereka buat.

Altar leluhur tidak diletakkan di ruangan atau tempat khusus sebagaimana mestinya. Mereka cukup menggantung altar leluhur di ruang tamu. Apabila akan melakukan sembahyangan apapun, maka mereka akan menyalakan lilin yang sudah diletakkan di altar tersebut dan juga membakar dupa. Dalam perayaan ritual-ritual sembahyangan, mereka tidak menggunakan pakaian khusus. Mereka beranggapan bahwa hal ini merupakan simbol kesederhanaan.<sup>55</sup>

Kesederhanaan dalam merayakan Hari Raya Imlek membuat banyaknya rangkaian ritual Imlek yang tidak dilakukan karena keterbatasan akses keramaian dan keuangan. Tidak ada pesta Barongsai dan kembang api karena hal tersebut dilarang pada Orde Baru. Pelarangan tersebut dan keterbatasan dana membuat

---

<sup>54</sup>Oktavia Sanjaya, "Fungsi dan Makna Penyambutan Hari Raya Imlek pada Masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung", *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, hlm 13.

<sup>55</sup>Selayaknya perayaan Imlek yang identik dengan pakaian merah, etnis Tionghoa Tambak Bayan tidak menggunakannya dan cukup dengan menggunakan pakaian sehari-hari. (Alfian Rizal Andre Ciputra, "PeCinan Tambak Bayan Surabaya Dalam fotografi Dokumenter", *skripsi*, jurusan fotografi fakultas seni media rekam institut seni indonesia Yogyakarta 2018)

mereka mengesampingkan ritual-ritual pendukung lain dan fokus pada ritual inti yaitu prosesi sembahyangan sebagai rasa syukur terhadap dewa dan leluhur serta prosesi makan malam bersama keluarga besar sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan.

Hal unik terdapat pada pesta pernikahan orang Tionghoa Tambak Bayan. Mereka menyelenggarakan pesta pernikahan di rumah makan bagi yang mampu dan cukup dilakukan di rumah bagi yang kurang mampu. Perayaan pesta tersebut dilakukan malam hari setelah diadakan prosesi pernikahan di klenteng. Pesta pernikahan dihadiri oleh seluruh keluarga besar serta tetangga.

Etnis Tionghoa Tambak Bayan memiliki istilah khusus untuk menganalogikan pesta pernikahan kelompoknya. Mereka menyebut pesta pernikahan dengan istilah Kanton, *Ngem HoLanSui* yang berarti minum limun. Sebutan *Ngem HoLanSui* merupakan sebuah anekdot bagi mereka karena limun merupakan sajian wajib dalam pesta pernikahan etnis Tionghoa Tambak Bayan.<sup>56</sup> Walaupun pesta pernikahan dilakukan di rumah makan, tetapi sajian dalam pesta tersebut tergolong sederhana.

Sebuah akulturasi budaya terlihat jelas dari pilihan sajian yang disajikan dalam pesta pernikahan mereka. Tidak ada jajanan khas Tiongkok seperti kue thok atau kue bulan, tetapi justru mereka menyajikan lempeng, apem, aneka gorengan dan

---

<sup>56</sup>Sehingga apabila ada etnis Tionghoa Tambak Bayan yang akan menghadiri pesta pernikahan sesamanya, mereka tidak menggunakan kata “akan menghadiri pesta pernikahan”. Mereka lebih memilih menggunakan anekdot “akan *Ngem HoLanSui*”. Lawan bicara dalam hal ini sudah mengetahui bahwa hal itu berarti mereka akan menghadiri pesta pernikahan.



makanan tradisional khas Jawa lainnya. Penyajian makanan tradisional khas Jawa dalam pesta pernikahan yang sakral ini membuktikan satu hal yaitu, bahwa mereka telah mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Surabaya dan bukan orang Cina.

Tradisi ini bertahan hingga tahun 1980an. Selepas tahun 1980an tradisi ini tetap berjalan namun telah mengalami proses modernisasi disamping juga perekonomian sebagian besar dari mereka yang membaik. Tidak hanya kue-kue tradisional, mereka juga menyuguhkan makanan-makanan utama seperti Soto, Rawon, Nasi Campur dan sebagainya. *HoLanSui* atau Limun kemudian lambat laun digantikan dengan minuman-minuman bersoda yang baru seperti *Sprite*, *Fanta*, maupun *Coca-Cola*. Pesta pernikahan juga merupakan ajang reuni keluarga besar yang tinggal di tempat lain akan datang dan jumlahnya bisa mencapai ratusan dalam satu marga.

Pemerintah masih memberikan kelonggaran terhadap pesta pernikahan etnis Tionghoa Tambak Bayan. Selama masa Orde Baru tidak ditemui pembubaran atau pelarangan perayaan pesta pernikahan etnis Tionghoa Tambak Bayan. Etnis Tionghoa Tambak Bayan memaknainya sebagai sebuah kewajaran karena hal tersebut menyangkut hak asasi manusia, sedangkan pemerintah menilai bahwa pesta pernikahan yang dilakukan secara intern di rumah makan dan tidak mengundang keramaian secara umum tidak melanggar Inpres No.14 tahun 1967.

Perkumpulan Dharma Warga sebelum Orde Baru memiliki banyak kegiatan baik sosial maupun budaya. Seperti dalam perayaan imlek, sebelum Orde Baru mereka rutin mengadakan petunjukan Barongsai dan pesta kembang api. Ritual

sembahyangan pun dilakukan di dalam gedung perkumpulan Dharma Warga secara meriah. Bahkan pada tahun 1960an, mereka memiliki kelompok band dan vokal yang beranggotakan anggota perkumpulan Dharma Warga.



**Gambar 3.1 Grup Band dan Vokal yang beranggotakan warga perkumpulan Dharma Warga pada tahun 1960an.**

Sumber: Koleksi foto pengurus perkumpulan Dharma Warga Surabaya.

Sebelum Orde Baru, anggota perkumpulan Dharma Warga cukup merata mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan di perkumpulan Dharma Warga mampu mengakomodir kepentingan lintas usia dari anggotanya. Terhentinya segala kegiatan perkumpulan Dharma Warga secara tiba-tiba pada Orde Baru membuat terputusnya regenerasi dalam kegiatan-kegiatan berbaur kebudayaan dan sosial yang sebelumnya rutin dilakukan.



**Gambar 3.2 Foto anggota perkumpulan Dharma Warga pada tahun 1950-an.**

Sumber: Koleksi foto pengurus perkumpulan Dharma Warga Surabaya.

Namun selama Orde Baru, tidak ada kegiatan berbaur kebudayaan yang dilakukan secara terbuka oleh etnis Tionghoa Tambak Bayan dan perkumpulan Dharma Warga sebagai perkumpulan para tukang kayu. Hal ini praktis menyebabkan terputusnya regenerasi dan pewarisan nilai-nilai kebudayaan serta kegiatan-kegiatan kolektif serupa baik di Kampung Tambak Bayan maupun di perkumpulan Dharma Warga.

Terhentinya segala kegiatan berdampak saat perkumpulan Dharma Warga mulai beraktifitas kembali pada awal tahun 2000an. Kegiatan-kegiatan perkumpulan tersebut didominasi dengan kegiatan yang diperuntukkan kepada para lansia. Para anggota yang aktif saat ini juga didominasi oleh para lansia. Para lansia ini kebanyakan juga bukan merupakan anggota baru, namun mereka merupakan

anggota lama yang ingin bernostalgia dan berkumpul kembali dengan teman-teman lama setelah puluhan tahun vakum berkegiatan.<sup>57</sup>

Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap etnis Tionghoa di Surabaya dan usaha untuk terus menggalakkan pembauran di kalangan etnis Tionghoa dan pribumi, pemerintah kotamadya Surabaya menggunakan jalur kebudayaan sebagai sarana untuk mencapai itu. Pemerintah mengadakan pertunjukan wayang pembauran di gedung Surabaya Indah pada sabtu, 11 Maret 1989. Pertunjukan wayang itu akan dipentaskan oleh 53 orang WNI keturunan dan 47 seniman.<sup>58</sup>

Pagelaran tersebut terbukti sangat menarik antusiasme warga Surabaya untuk menyaksikannya. Pada sabtu 4 Maret 1989 atau satu minggu sebelum acara dilaksanakan, sebanyak 600 lembar dari total 1000 lembar tiket telah habis terjual. Tiket tersebut dijual seharga Rp. 10.000,00 untuk kelas VIP dan utama dan Rp. 7.500,00 untuk kelas biasa. Bahkan tiket untuk kategori pelajar sudah habis terjual. Pagelaran tersebut dilaksanakan untuk memperingati Supersemar. Oleh karena itu lakon yang dipentaskan berjudul “Anoman Duta”, yaitu merupakan lakon yang menceritakan pembauran situasi yang dimotori oleh anak-anak muda.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Para lansia yang aktif saat ini kebanyakan berusia 8-20 tahun ketika perkumpulan Dharma Warga berhenti berkegiatan. Mereka aktif kembali berkegiatan setelah lebih dari 30 tahun tidak berkegiatan di perkumpulan Dharma Warga.

<sup>58</sup>Pemilihan pagelaran kesenian wayang orang oleh pemerintah kota Surabaya didasari oleh kedekatan emosional etnis Tionghoa dengan kesenian wayang. Seperti wayang Potehi yang merupakan salah satu produk kebudayaan Tionghoa yang menarik dan sangat diminati, begitu juga dengan wayang orang. Salah satu perkumpulan Tionghoa yang sangat terkenal terkait pagelaran kesenian wayang orangnya adalah perkumpulan “Ang Hien Hoo” dari Malang. Salah satu pemainnya, Le Kiok Hwa (Nelly Lee) bahkan menarik perhatian presiden Soekarno hingga diberikan nama Ratna Djuwita. (Junus Jahja, *op.cit.*, hlm. 296.)

<sup>59</sup>“Wayang Pembauran”, *Surabaya Post*, 4 Maret 1989.

Hal ini cukup menarik karena ketika terjadi pelarangan terhadap kegiatan kebudayaan yang mengundang keramaian, pemerintah sendiri justru melakukan hal sebaliknya. Tentu hal ini memiliki muatan politis di baliknya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ini sukses menyedot antusiasme masyarakat baik itu etnis Tionghoa maupun warga pribumi.

Sebagai etnis Peranakan dan minoritas, etnis Tionghoa Tambak Bayan berusaha membaaur dengan baik terhadap sekitarnya dalam segala aspek termasuk pola komunikasi. setidaknya terdapat tiga tingkatan bahasa yang digunakan oleh etnis Tionghoa Tambak Bayan dalam berkomunikasi di lingkungannya baik dengan warga pribumi maupun dengan sesamanya. Tiga tingkatan bahasa ini terbentuk secara alami dalam kurun waktu yang lama sebagai turunan dari proses akulturasi yang dilakukan oleh mereka sendiri.<sup>60</sup>

Tingkatan yang pertama adalah bahasa keakraban. Bahasa ini adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh etnis Tionghoa Tambak Bayan dalam berkomunikasi. Bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sahabat dekat, keluarga atau saudara. Mereka menggunakan bahasa keakraban apabila tidak ada sekat terhadap lawan bicaranya. Bahasa keakraban etnis Tionghoa Tambak Bayan adalah bahasa Jawa. mereka biasa berkomunikasi dengan penduduk pribumi yang sudah menjadi *sahabat* bagi mereka dengan bahasa Jawa. penggunaan bahasa ini

---

<sup>60</sup>Jennifer Cushman & Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm. 133.

mencerminkan fakta bahwa mereka hanyalah minoritas kecil yang cepat berakulturasi dengan budaya setempat.

Tingkatan yang kedua adalah bahasa solidaritas. Bahasa solidaritas digunakan oleh mereka ketika berbicara satu sama lain tanpa memperdulikan sub budaya. Bahasa solidaritas serupa dengan bahasa keakraban. Sehingga apabila bahasa keakraban etnis Tionghoa Tambak Bayan adalah bahasa Jawa, maka bahasa solidaritas juga menggunakan bahasa Jawa. perbedaan terletak pada situasi penggunaannya. Mereka menggunakan bahasa solidaritas sebagai sarana berkomunikasi dengan warga pribumi yang tidak terlalu akrab atau tidak kenal namun masih jelas asal-usulnya sehingga bahasa yang digunakan lebih halus dan sopan. Disisi lain mereka juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa solidaritas ketika berkomunikasi dengan sesamanya karena kesamaan kultur dan budaya.<sup>61</sup>

Tingkatan ketiga adalah bahasa untuk kalangan umum yang tentu saja dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat umum atau berbicara dengan pribumi dari lain daerah. Penggunaan ketiga bahasa ini didasarkan pada waktu dan tempat yang sesuai. Ketidak sesuaian waktu dan tempat dalam menggunakan bahasa ini terkadang menimbulkan permasalahan yang bermuara pada tuduhan rasialis.<sup>62</sup> Menariknya di

---

<sup>61</sup>*Ibid.* hlm, 136.

<sup>62</sup>Sepeti yang dialami oleh Wong Sui King (Sugita Wijaya) ketika menjemput rekannya dari Tiongkok yang baru pertama kali ke Indonesia di bandara internasional Juanda pada tahun 90an. Ketika bercakap-cakap menggunakan bahasa Mandarin Sugita Wijaya ditegur oleh petugas bandara untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. (Wawancara dengan warga Tambak

kampung Tambak Bayan dimana etnis Tionghoa merupakan mayoritas, penduduk pribumi justru banyak menggunakan istilah-istilah Tionghoa dalam berkomunikasi. Bahkan tidak sedikit penduduk pribumi yang fasih berbahasa Mandarin karena perkawinan dengan etnis Tionghoa Tambak Bayan.

Dari aspek kebudayaan ini terlihat jelas bahwa dilihat dari sisi manapun etnis Tionghoa Tambak Bayan telah melebur dan menjadi Jawa. berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh mereka sudah tidak memiliki perbedaan signifikan dengan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Perbedaan yang ada hanya pada ritual-ritual kebudayaan dan keagamaan yang bermuara pada leluhur. Sedangkan selebihnya sama-sekali tidak ada perbedaan sehingga dalam tingkatan seperti ini mereka sukses dan layak untuk dianggap *ekuivalen* dengan warga pribumi.

---

Bayan, Bapak Wijaya (Wong Sui King) pada tanggal 6 mei 2018 pukul 20.00 di Kampung Tambak Bayan.